

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, dimana tugas pokok dan fungsinya diatur dalam - Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui *literature* yang terseleksi dan *up to date*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Rencana Strategis

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, yang memuat Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kota Tebing Tinggi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kota Tebing Tinggi. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan program dan kegiatan yang akan disusun nantinya bisa terarah dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditargetkan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Secara ringkas tahapan penyusunan renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan keputusan Kepala Daerah.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyerahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan;
- d. Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
- e. Kepala Dinas menyampaikan Renstra kepada BAPPEDA untuk diverifikasi, dengan maksud untuk memastikan kesesuaian dengan RPD. Verifikasi oleh BAPPEDA harus dapat

menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan RPD.

1.1.3 Keterkaitan Renstra dan RPD, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra, RPJPD, RPD, RKPD terdapat keterkaitan dokumen maupun dalam rangka penyelenggaraanya terjadi secara simultan (serentak) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian Renstra yang ada saat ini, disusun untuk memenuhi keterkaitan dokumen dimaksud sebagai komitmen bersama bagi seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan perpustakaan yang mencerdaskan masyarakat dan kearsipan sebagai pilar akuntabilitas pemerintahan. Hubungan antara dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah dengan dokumen RPD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Alur Keterkaitan Perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi 2023-2026



Gambar diatas memperlihatkan Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dan menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja. RPD, Renstra, dan Renja

memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan penganggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan Renstra Provisi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
- 14) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
- 16) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

- 17) Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 selama 4 (empat) Tahun adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 selama 4 (empat) Tahun adalah:

1. Menjadi pedoman resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Menjadi acuan pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Renja SKPD;
3. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.
4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Secara umum kondisi internal dan eksternal Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi cukup kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat didalam mendukung penerapan Dinas Perpustakaan. Secara umum, perkembangan dimaksud dapat dicermati dari beberapa hal sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai **tugas** : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dan tugas pembantuan. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat secara terpadu dan pelayanan administratif;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian, mempunyai **fungsi** :
- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - 2) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian, mempunyai **fungsi** :
- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - 2) Pengordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;

- 4) Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
- 5) Pelayanan di bidang keuangan;
- 6) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang perpustakaan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perpustakaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan;
 - b. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - c. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan.
- a.** Seksi pelayanan dan kerja sama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perpustakaan di bidang pelayanan dan kerja sama perpustakaan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** :
- 1) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan kerja sama perpustakaan;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan kerjasama perpustakaan;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan dan kerja sama perpustakaan; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b.** Seksi Akuisisi dan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perpustakaan di bidang akuisisi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuisisi, pengolahan, dan pelestarian bahan pustaka;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan akuisisi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan kegiatan akuisisi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perpustakaan di bidang pengolahan teknologi informasi perpustakaan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** :
- 1) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan teknologi informasi perpustakaan;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengolahan teknologi informasi perpustakaan;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan pengolahan kegiatan teknologi informasi perpustakaan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Arsip

Bidang Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang arsip;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan arsip;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kearsipan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip;
 - b. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip;
 - c. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip.
- a. Seksi akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang arsip di bidang pengolahan dan pelestarian arsip. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** :

- 1) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pelestarian arsip.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pelestarian arsip;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengolahan dan pelestarian arsip; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi layanan dan pembinaan arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang arsip dibidang layanan dan pembinaan arsip. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** :
- 1) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis bidang layanan dan pembinaan arsip;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan layanan dan pembinaan arsip;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan kegiatan layanan dan pembinaan arsip; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang arsip di bidang Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** :
- 1) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip;
 - 3) Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi :

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Berdasarkan sejarah kelebagaannya maka struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini merupakan hasil reorganisasi atas struktur organisasi sebelumnya.

Pada awalnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2002 dengan komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

1. 1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering III a.
2. 3 (tiga) struktur untuk jabatan eselonering IV a.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka struktur jabatan organisasi Kantor Perpustakaan Umum mengalami penyesuaian, yaitu adanya perubahan bidang tugas pada masing-masing jabatan, serta nomenklatur. Adanya perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberi peran yang lebih akomodatif bagi Dinas Perpustakaan sesuai dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan beban kerja.

Selanjutnya susunan jabatan struktural Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan pada Eselon II.b dan membawahi Sekretaris yang berkedudukan pada Eselon III.a dan 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang berkedudukan pada Eselon III.b, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan, dan 3 (tiga) kasi pada masing-masing bidang dan yang berkedudukan pada Eselon IV.a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Perpustakaan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi sekaligus pejabat struktural pada saat ini dapat dilihat pada Bagan berikut

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA T. TINGGI.**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 2 Tahun 2021**



2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Komposisi Pegawai, Sarana Dan Prasarana Serta Anggaran

2.2.1. Komposisi Pegawai

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi adalah salah satu unit kerja di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga teknis daerah. Sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan. Fungsi, peranan, dan tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada era otonomi ini semakin kuat karena seiring dengan terjadinya desentralisasi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diikuti juga dengan desentralisasi sistem perencanaan, yaitu dari *top down planning* menjadi *bottom up planning*. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengalokasian dana anggaran.

Sistem Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan representasi dari penyerahan seluruh wewenang dan tanggungjawab kepada daerah untuk menata dan mengelola rumah tangganya sendiri tanpa harus menjalankan program-program tertentu dari pemerintah pusat, yang terkadang tidak memiliki urgensi yang jelas bagi suatu daerah. Dengan demikian aspirasi dan kebutuhan daerah dapat diakomodir melalui sistem perencanaan daerah karena keputusan strategis saat ini ada ditangan daerah itu sendiri.

Fungsi dan peranan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam perencanaan daerah yang demikian kuat, telah mendorong organisasi untuk selalu meningkatkan kapasitas organisasi agar dapat berperan lebih maksimal lagi dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Sejak diwajibkannya organisasi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, berbagai hasil-hasil yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sumber Daya Organisasi

Dilihat dari kondisi jabatan struktural, saat ini dari 12 (Dua Belas) jabatan yaitu jabatan struktural eselon II (Kepala Dinas), Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan), dan Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kerjasama, Kasi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Kasi Teknologi Informasi Perpustakaan, Kasi Pengolahan dan Pelestarian Arsip, Kasi Layanan dan Pembinaan Arsip dan Kasi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip).

Ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan, dari 12 jabatan struktural yang terisi, 25% Diploma, 50% bergelar sarjana (S1), dan 25% bergelar (S2). Kemudian ditinjau dari pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Perpustakaan, dari 12 formasi jabatan yang terisi hanya 66% pejabat struktural Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi yang telah mengikuti diklat teknis di bidang Perpustakaan.

Kondisi ini memberi gambaran bahwa masih terbatasnya kemampuan teknis pejabat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi di bidang Perpustakaan dan Arsip. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi telah cukup baik, meskipun indikator yang digunakan belum benar-benar objektif dan ilmiah.

2.2.2. Kondisi Organisasi dan Lingkup Kewenangan yang Diinginkan

Dari gambaran tentang kondisi umum pencapaian kinerja organisasi saat ini, telah disepakati perlunya meningkatkan pencapaian kinerja organisasi di masa mendatang. Secara sistematis kondisi organisasi dan lingkup kewenangan yang diinginkan di masa mendatang dijelaskan sebagai berikut :

SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kualifikasi merupakan aspek utama yang mutlak dimiliki oleh organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Ditinjau dari peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur perencana akan dilakukan melalui berbagai upaya dan strategi. Secara detil kondisi SDM yang diharapkan dimasa mendatang adalah :

1. Dalam tahun ke depan proporsi pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah hendaknya telah berpendidikan S1 dan telah mengikuti Diklat Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 50 persen.
2. Dalam lima tahun ke depan diharapkan 20 persen pegawai Dinas Perpustakaan berpendidikan S2, dan 75 persen berpendidikan S1.

Seluruh jajaran organisasi telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkala dan berkelanjutan, sehingga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi benar-benar menjadi salah satu institusi pemerintah Kota Tebing Tinggi yang profesional, cerdas, dan bertanggungjawab untuk terwujudnya visi dan misi pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Komposisi pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Maret 2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (org)
1	Laki – Laki	5
2	Perempuan	19
	Jumlah	24

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Maret 2022)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	10
3	Diploma	7
4	SLTA	4
	Jumlah	24

Tabel 1.3 .
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
(Posisi Per Maret 2022)

No	JenisDiklat	Jumlah (org)
1	Adumla/Diklatpim IV	7
2	Spama / Diklatpim III	1
3	Spamen / Diklatpim II	-
	Jumlah	8

Tabel 1.4 .
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per Maret 2022)

No	Golongan	Jumlah (org)
	PNS	
1	Pembina Tk. I (IV/b)	
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	3
2	Penata Tk I (III/d)	6
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk I (III/b)	1
	Penata Muda (III/a)	4
	Jumlah	13
3	Pengatur (II/d)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/c)	3
	Jumlah	8
6	THL	29
	Jumlah	29
	JumlahKeseluruhan	53

2.2.3. Sarana Prasarana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi
(Posisi Per Maret 2022)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung		
	1.1. Perpustakaan Umum	7 ruangan	1 Ruang kepala
			1 Ruang Audiovisual
			1 Ruang Sekretariat
			1 Ruang Baca Umum
			1 Ruang Baca Anak
			1 Ruang Sirkulasi
			1 Ruang Pengolahan
	1.2. Rumah Baca	4 Unit	1 Rumah Baca Bandar Utama
			1 Rumah Baca Persiakan
			1 Rumah Baca Bagelen
			1 Rumah Baca Lalang
	1.3. Depo Arsip	1 Unit	1 Depo Arsip
2.	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 6 (Enam)	1 unit	Mobil Unit Perpustakaan Keliling
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	6 unit	1 Kendaraan Dinas Kepala Dinas, 1 Kendaraan Pool Dinas, 4 Mobil Unit Perpustakaan Keliling
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	7 unit	-
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	998 Buah	-
4.	Buku Perpustakaan	25042 Judul	58094 Eksemplar

2.2.4. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode yang lalu

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tebing Tinggi memberikan pelayanan baik pelayanan kedalam secara internal yaitu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik kepada masyarakat umum melalui pelayanan perpustakaan umum dan pemanfaatan jasa kearsipan, untuk membantu menjalankan operasional kegiatan tersebut didukung pula oleh tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis serta tenaga kontrak dari berbagai disiplin ilmu.

Beberapa indikator kinerja yang dapat ditampilkan untuk menilai kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka) ke perpustakaan
2. Nilai Pengawasan Kearsipan

Dalam penyusunan target kinerja SKPD di tahun 2023-2026 maka perlu memperhatikan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 – 2022. Pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.3.1 sebagaimana tabel berikut:

Tabel -2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

Indikator Kinerja	Target RPJMD Kabupaten/ Kota Pada RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/ Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(4)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	K	K	K			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Tersedianya unit administrasi kearsipan	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	unit	0	0	100	0	
Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan supervisi atas pengelolaan arsip dinamis	5 OPD	5 OPD	5 OPD	6 OPD	6 OPD	11 OPD	12 OPD	7 OPD	12 OPD	OPD	220,00%	240,00%	140,00%	200,00%	
Jumlah Arsip statis yang diolah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	9 Dok	9 Dok	8 Dok	26 Dok	Dok	75,00%	75,00%	66,67%	216,67%	
Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	0 Dok	2 Dok	0 Dok	Dok	200,00%	0,00%	200,00%	0,00%	

Indikator Kinerja	Target RPJMD Kabupaten/ Kota Pada RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/ Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(4)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	K	K	K			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Jumlah Keg peningkatan SDM arsip	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	0 Keg	2 Keg	0 Keg	1 Keg	Keg	0,00%	100,00%	0,00%	50,00%	
Jumlah Org ke perpustakaan	170.000 Org	180.000 Org	190.000 Org	200.000 Org	210.000 Org	242.405 Org	237.851 Org	79.474 Org	97.677 Org	Org	142,59%	132,14%	41,83%	46,51%	
Pengembangan perpustakaan taman kota/ruang terbuka publik di tiap kecamatan	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	100,00%	100,00%	100,00%	60,00%	
Jumlah perpustakaan keliling (Bus keliling dan Motor Cerdas)	4 Unit	5 Unit	6 Unit	8 Unit	9 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	150,00%	120,00%	100,00%	66,67%	

Indikator Kinerja	Target RPJMD Kabupaten/ Kota Pada RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/ Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(4)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	K	K	K			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Jumlah perpustakaan umum bacaan masyarakat (rumah baca)	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	Unit	100,00%	100,00%	75,00%	80,00%	
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1850 judul	1910 judul	1980 judul	2060 judul	2150 judul	22794 Judul	23226 Judul	23597 Judul	25042 Judul	Judul	123,21%	121,60%	119,18%	116,47%	

Tabel -2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi
 Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH																	
1. Belanja Pegawai	1.868.994.000	1.978.898.000	2.072.945.000	2.038.342.000	2.821.447.000	1.833.668.502	1.839.642.123	1.889.423.450	1.972.005.069		98,11%	92,96%	91,15%	96,75%		9,06%	7,54%
3. Belanja Barang dan Jasa	1.539.830.800	1.388.186.071	1.129.313.740	1.385.306.424	1.152.436.730	1.444.977.878	1.288.428.107	1.041.691.930	1.322.306.451		93,84%	92,81%	92,24%	95,45%		-10,04%	-8,49%
4. Belanja Modal	266.700.000	351.365.080	164.098.200	838.023.200	48.690.400	264.510.100	350.991.500	160.278.400	820.838.551		99,18%	99,89%	97,67%	97,95%		214,22%	210,32%
Total	3.675.524.800	3.718.449.151	3.366.356.940	4.261.671.624	4.022.574.130	3.543.156.480	3.479.061.730	3.091.393.780	4.115.150.071		97,04%	95,22%	93,69%	96,72%		15,95%	16,14%

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2021 menunjukkan adanya peningkatan dengan anggaran sebesar Rp.586.146.824,00 dan peningkatan realisasi anggaran sebesar Rp.571.993.591,00. Anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2021 bersumber dari pendapatan APBD (DAU) dan Dana DAK untuk Tahun 2019 dan 2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

2.1.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Bidang lingkup perpustakaan dan kearsipan sangat luas dan kompleks sehingga kedua bidang ini merupakan bidang teknis dan strategis bagi perkembangan peradaban masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Sejalan dengan bergulirnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dituntut untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pemustaka. Tantangan di bidang perpustakaan dan kearsipan diantaranya adalah:

1. Merubah mindset masyarakat dan aparatur tentang perpustakaan dan kearsipan, yang belum menganggap membaca dan kearsipan merupakan satu kebutuhan yang penting.
2. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan.
3. Sarana kerja untuk pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip masih belum memadai;
4. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan masif menuntut Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk dapat menyesuaikan diri serta sekaligus memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan untuk perpustakaan dan kearsipan.
5. Adanya virtual library yang bisa diakses dari luar perpustakaan menyebabkan pengguna perpustakaan semakin berkurang.
6. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar SKPD
7. Pengelolaan Arsip masih rendah dikarenakan (a) ketiadaan depot arsip (b) kesadaran terhadap pentingnya arsip masih rendah, (c) komitmen pemerintah daerah terhadap penyelamatan arsip rendah (d) Gedung arsip belum memenuhi standar.
8. Anggaran untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan masih rendah.

2.1.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang di bidang perpustakaan dan kearsipan diantaranya adalah:

1. Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan perundangan terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan dibidang peprustakaan dan bidang kearsipan daerah yaitu:
 - a. UU No 43/2007 tentang Perpustakaan.

- b. UU No 43/ 2009 tentang Kearsipan
 - c. Peraturan daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK (*e-Government*) terbuka peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi untuk menyediakan Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK (*e-Library/e-book*) dan Pelayanan Kearsipan berbasis TIK, JIKN dan SIKD kearsipan (*e-Archive*);
 3. Pengembangan pelayanan automasi perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi untuk Katalog online, sirkulasi dan pendaftaran anggota perpustakaan yang terkoneksi di setiap perpustakaan yang ada di Kota Tebing Tinggi.
 4. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan media sosial lainnya. Perpustakaan dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana promosi perpustakaan dan penyebaran informasi terbaru.
 5. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan SDM yang *capable* dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.
 6. Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat ke depan.

2.4.3. Analisis terhadap Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dan K/L

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi telah melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang ada pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara, agar memiliki peluang dalam hal pengusulan anggaran yang bersumber dana dari APBD Provinsi untuk pengembangan budaya baca dan pengembangan arsip.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi juga telah melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang ada pada Renstra Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia, agar memiliki peluang dalam hal pengusulan anggaran yang bersumber dana dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan budaya baca. Dengan adanya peraturan yang diterbitkan baik dari PERPUSNAS maupun ANRI makan memberikan tantangan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi untuk

melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan dan dengan peningkatan kapabilitas penyelenggara baik perpustakaan dan kearsipan.

2.4.4. Pelayanan OPD Dinas Perpustakaan

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yakni Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perpustakaan terdiri dari: Layanan referensi; Layanan anak; Layanan audio visual; Layanan OPAC; Layanan perpustakaan malam; Layanan perpustakaan keliling (Bus keliling dan motor cerdas); Layanan rumah baca; Layanan Pojok Baca Digital, Layanan sirkulasi; Layanan website, Layanan pustaka taman dan BUNIK (Ebook).
2. Pelayanan Kearsipan, meliputi: Melakukan pendataan dan penataan arsip daerah; Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui fumigasi; Melaksanakan fasilitasi pengembangan kearsipan daerah, penelusuran arsip bersejarah dan penyusunan citra daerah; Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada tenaga kearsipan di lingkungan instansi pemerintah;

Pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diharapkan bisa menjadi perpustakaan digital seutuhnya, oleh karena itu masih dibutuhkan pengembangan sistem otomasi perpustakaan dan pengintegrasian ke Rumah Baca dan Bus Keliling, tersedianya ebook/ koleksi buku digital.

Pengembangan pelayanan kearsipan diharapkan kedepannya melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai peraturan yang berlaku, memiliki depo arsip untuk penyimpanan arsip statis tersebut, membuat layanan peminjaman, dan penggandaan arsip, melaksanakan pemusnahan arsip serta memiliki data base informasi kearsipan serta penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi maka dirumuskan isu-isu strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan :

- a. Masih rendahnya tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan.
- b. Kurangnya kompetensi pustakawan Kurangnya sumber daya pengelola perpustakaan
- c. Masih rendahnya layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan layanan perpustakaan digital (e-library).

2. Urusan Kearsipan :

- a. Masih rendahnya pengelolaan tingkat ketersediaan arsip baik arsip dinamis dan statis sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
- b. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal
- c. Belum adanya SDM yang berbasis kearsipan

3.2. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

a. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Terkait

Telaahan terhadap Renstra Lembaga Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) dan Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Renstra Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Propinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun Visi dan Misi Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

- b. Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi: “Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.
- c. Tujuan Pembangunan Perpustakaan Nasional Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah: “Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.
- d. Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau dampak, yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator: Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024. Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Visi dan Misi Renstra Lembaga Arsip Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Visi ANRI Tahun 2020-2024 Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugastugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut: (1) memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan; (2). memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi; (3) memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah; (4) melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (5) memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

b. Telaahan Renstra Provinsi

Visi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Tahun 2018-2023 adalah **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”**. Dalam mewujudkan Visi tersebut terdapat 5 (lima) Misi yang akan dicapai, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara mendukung Misi Gubernur Sumatera Utara yang ke-3 yaitu **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.”**

Untuk mendukung Misi ke 3 tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2018-2023. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.”**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara menetapkan **sasaran** dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Layanan Prima Perpustakaan, meningkatnya Pengguna Perpustakaan (Pemustaka) dan Kerjasama Perpustakaan ,
- b. Meningkatnya Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara yang ditandai pengembangan layanan perpustakaan digital (e-library)
- c. Meningkatnya minat baca
- d. Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan guna peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Bagi Masyarakat.
- e. Meningkatnya ketersediaan semua jenis bahan perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Meningkatnya Pelestarian dan mendayagunakan semua karya tulis, kaya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual Pengarang Sumatera Utara untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan reaktualisasi kearifan lokal budaya daerah untuk peningkatan koleksi Deposit Sumatera Utara dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka.

- g. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang bersertifikasi.
- h. Indeks Minat Membaca
- i. Meningkatkan pengumpulan dokumentasi arsip audiovisual yang mempunyai nilai sejarah
- j. Meningkatnya pengetahuan ASN di Bidang Kearsipan tentang pengelolaan arsip dinamis.
- k. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.
- l. Meningkatnya Promosi, Sosialisasi dan Lomba Pengelolaan Arsip.
- m. Meningkatnya pengetahuan tentang jabatan fungsional arsiparis

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, untuk urusan yang ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah kota Tebing Tinggi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah walaupun secara tidak langsung adalah :

1. Gedung Perpustakaan pada saat ini berlokasi di jalan Dr. Sutomo No. 40, lokasi tersebut sudah strategis untuk dijangkau, namun terbatas untuk parkir pengunjung.
2. Sudah tersedia depo arsip, namun tidak memenuhi standar yang ada, karena dekat . dengan pemukiman masyarakat.

Tabel-3.1

Permasalahan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Perpustakaan	1. Masih rendahnya tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Kurangnya kecukupan koleksi perpustakaan, Gedung perpustakaan yang belum representatif, dan masih rendahnya publikasi/ promosi perpustakaan ke masyarakat
	2. Kurangnya kompetensi pustakawan	Kurangnya pelatihan/ diklat tentang perpustakaan
	3. Masih rendahnya layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan layanan perpustakaan digital (e-library).	Kurangnya sarana prasarana pendukung, dan Sumber Daya Manusia di bidang Informasi Teknologi
Urusan Kearsipan		
	1. Masih rendahnya pengelolaan tingkat ketersediaan arsip baik arsip dinamis dan statis sebagai bahan akuntabilitas kinerja.	Kurangnya kompetensi SDM pengelola kearsipan dan minimnya sarana prasarana pendukung untuk pengelolaan kearsipan dan belum adanya depo arsip

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	2. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal.	Kurangnya sarana prasarana pendukung, dan Sumber Daya Manusia di bidang Informasi Teknologi Kearsipan
	3. Belum adanya SDM yang berbasis kearsipan.	Kurangnya pelatihan/ diklat tentang kearsipan dan belum adanya penerimaan CPNS berlatar belakang kearsipan

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

3.3.1. Urusan Perpustakaan

a. Masih Rendahnya Tingkat Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan

Tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan mengalami penurunan yang signifikan, dimana di tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 97.677 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi populasi (4 s.d 59 Tahun) Tahun 2021 sejumlah 150.749 orang, maka capaian persentase pengunjung perpustakaan adalah: 64,79%. Masih rendahnya tingkat kunjungan pemustaka ini di sebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Koleksi buku yang masih terbatas belum dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Untuk itu Dinas Perpustakaanberusaha melaksanakan program penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% pertahun dari jumlah judul yang telah ada.
2. Gedung Perpustakaan Kota Tebing Tinggi yang belum representative dan belum bisa menjadi destinasi wisata bagi pengunjung perpustakaan. Selain itu juga masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas perpustakaan seperti penyediaan komputer layanan dan meubeleur pendukung layanan.
3. Masih rendahnya publikasi/ promosi perpustakaan ke masyarakat

Saat ini pemerataan layanan perpustakaan dalam mendukung publikasi/ promosi perpustakaan ke masyarakat luas belum maksimal. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi memiliki 4 (empat) rumah baca dan 5 (lima) mobil unit perpustakaan keliling untuk melayani 35 (tiga puluh lima) kelurahan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kota Tebing Tinggi. Sehingga masih diperlukan penambahan rumah baca untuk 1 (satu) kecamatan (Kecamatan Bajenis). Juga diperlukan sosialisasi serta pameran-pameran promosi perpustakaan baik berskala Kota, Provinsi maupun Nasional .

b. Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Pada saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah masih memiliki 7 (tujuh) orang PNS yang mempunyai latar belakang ilmu tentang Perpustakaan, dimana seharusnya dibutuhkan 9 (sembilan) orang tenaga pustakawan. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tebing Tinggi telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi dalam perekrutan SDM melalui penerimaan CPNS dan atau penambahan tenaga harian lepas. Selain itu juga memberikan pelatihan dan pendidikan bagi personil yang tersedia yang berkenaan dengan bidang tugas masing-masing.

- c. Masih rendahnya layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan layanan perpustakaan digital (e-library).

Perpustakaan saat ini sedang mengembangkan Layanan Perpustakaan untuk menuju perpustakaan berbasis digital namun terhambat dikarenakan kurangnya sarana prasarana pendukung, dan Sumber Daya Manusia di bidang Informasi Teknologi. Diharapkan kedepannya integrasi perpustakaan berbasis digital sudah dilaksanakan terutama di perpustakaan umum dan juga di rumah baca dan layanan perpustakaan keliling.

3.3.2. Urusan Kearsipan

- a. Masih rendahnya pengelolaan tingkat ketersediaan arsip baik arsip dinamis dan statis sebagai bahan akuntabilitas kinerja.

Rendahnya tingkat pengelolaan ketersediaan arsip baik arsip dinamis dan statis disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola kearsipan, minimnya sarana prasarana pendukung untuk pengelolaan kearsipan, Gedung Arsip belum sesuai dengan standar, belum memiliki depo arsip untuk penyimpanan arsip statis dan Keberadaan records centre sebagai tempat yang menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif pada masing-masing perangkat daerah belum optimal.

- b. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal.

Belum optimalnya penerapan pengelolaan arsip berbasis digital disebabkan karena kurangnya sarana prasarana pendukung berbasis teknologi informasi dan masih minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang Informasi Teknologi Kearsipan.

- c. Belum adanya SDM yang berbasis kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini belum memiliki pegawai dengan latar belakang arsiparis. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tebing Tinggi telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi dalam perekrutan SDM melalui penerimaan CPNS dan atau penambahan tenaga harian lepas. Selain itu juga memberikan pelatihan dan pendidikan bagi personil yang tersedia yang berkenaan dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi.

Tujuan Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Dari 4 (empat) tujuan yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, Dinas Perpustakaan masuk ke dalam tujuan ke 4 (empat) yaitu Pengoptimalan Reformasi Birokrasi.

SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Dari 9 (Sembilan) sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, Dinas Perpustakaan masuk ke dalam sasaran 8 dan 9 yaitu urusan arsip masuk ke sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan urusan perpustakaan masuk ke sasaran Pelayanan Publik yang Prima.

Tabel-4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan Kota: Pengoptimalan Reformasi Birokrasi							
		Sasaran Kota : Pelayanan Publik yang Prima						
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		Indeks Minat Baca Masyarakat	77	78	79	80	81
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	62%	63%	64%	65%	66%
		Sasaran Kota : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel						
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas	70%	71%	72%	73%	74%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Secara Baku	Nilai Pengawasan Kearsipan	68	68,5	69	69,5	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya, maka disusunlah strategi pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi serta regulasi yang ada.

Strategi Jangka Menengah SKPD

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan tujuan Kota Tebing Tinggi yang akan dilaksanakan oleh SKPD sebagai dasar penyusunan Renstra SKPD tahun 2023-2026, sebagai payung pada perumusan program kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah

Tabel : 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
	Tujuan Kota: Pengoptimalan Reformasi Birokrasi				
	Sasaran Kota : Pelayanan Publik yang Prima				
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perpustakaan	<p>1.1.1 Penyelenggaraan sistem dan akses pelayanan perpustakaan yang merata dan berkualitas</p> <p>1.1.2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi secara internal dalam pengelolaan OPD/unit kerja</p>	<p>1.1.1.1 Menumbuhkan daya tarik perpustakaan dan budaya literasi kepada masyarakat.</p> <p>1.1.2.1 Meningkatkan kualitas kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut persoalan administrasi, kinerja dan sarana prasarana dan keuangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</p>
	Sasaran Kota : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				

NO.	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah	2.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Secara Baku	2.1.1.	Peningkatan kualitas tata kelola arsip daerah.	2.1.1.1	Mewujudkan manajemen pengelolaan kearsipan daerah yang profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penentuan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi tahun 2023 – 2026.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelola Arsip

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Sedangkan rincian program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel 6.1, sebagai berikut :

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
			2023		2024		2025		2026	
1	2	3	5	6	9	10	9	10	9	10
2										
2	23			Rp 4.500.000.000,00		Rp 5.800.000.000,00		Rp6.150.000.000,00		Rp 6.500.000.000,00

2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	92	Rp 4.500.000.000,00	93	Rp 5.000.000.000,00	93	Rp5.250.000.000,00	94	Rp 5.500.000.000,00
2	23	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 5.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 12.000.000,00
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00	4 Dokumen	Rp 12.000.000,00
				2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen	Rp -	4 dokumen	Rp 5.000.000,00	4 dokumen	Rp 7.500.000,00	4 dokumen	Rp 10.000.000,00
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 2.870.000.000,00		Rp 3.025.000.000,00		Rp3.125.000.000,00		Rp 3.230.000.000,00

2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Rp 2.850.000.000,00	38 Orang/bulan	Rp 3.000.000.000,00	38 Orang/bulan	Rp3.100.000.000,00	38 Orang/bulan	Rp 3.200.000.000,00
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	1 Laporan	Rp 25.000.000,00	1 Laporan	Rp 25.000.000,00	1 Laporan	Rp 30.000.000,00
2	23	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp 51.000.000,00		Rp 51.500.000,00		Rp 60.000.000,00		Rp 62.000.000,00
2	23	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 51.000.000,00	2 Dokumen	Rp 51.500.000,00	3 Dokumen	Rp 60.000.000,00	3 Dokumen	Rp 62.000.000,00
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp265.000.000,00		Rp 290.000.000,00		Rp 315.000.000,00		Rp 366.000.000,00
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 5.000.000,00	4 paket	Rp 5.000.000,00	4 paket	Rp 7.500.000,00	4 paket	Rp 10.000.000,00

2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 50.000.000,00	4 paket	Rp 55.000.000,00	4 paket	Rp 55.000.000,00	4 paket	Rp 60.000.000,00
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	Rp 25.000.000,00	4 paket	Rp 30.000.000,00	4 paket	Rp 32.500.000,00	4 paket	Rp 36.000.000,00
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 35.000.000,00	4 Dokumen	Rp 40.000.000,00	4 Dokumen	Rp 45.000.000,00	4 Dokumen	Rp 60.000.000,00
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp150.000.000,00	12 Laporan	Rp 160.000.000,00	12 Laporan	Rp 175.000.000,00	12 Laporan	Rp 200.000.000,00
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp219.000.000,00		Rp 350.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Rp123.000.000,00	1 Paket	Rp 150.000.000,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00	1 Paket	Rp 200.000.000,00

2	23	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 96.000.000,00	5 Unit	Rp 200.000.000,00	5 Unit	Rp 200.000.000,00	5 Unit	Rp 200.000.000,00
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp691.000.000,00		Rp 740.000.000,00		Rp 770.000.000,00		Rp 800.000.000,00
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp140.000.000,00	12 Laporan	Rp 170.000.000,00	12 Laporan	Rp 185.000.000,00	12 Laporan	Rp 200.000.000,00
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp551.000.000,00	12 Laporan	Rp 570.000.000,00	12 Laporan	Rp 585.000.000,00	12 Laporan	Rp 600.000.000,00
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp399.000.000,00		Rp 533.500.000,00		Rp 570.000.000,00		Rp 630.000.000,00
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 20.000.000,00	1 Unit	Rp 30.000.000,00	1 Unit	Rp 40.000.000,00	1 Unit	Rp 50.000.000,00

2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp102.000.000,00	7 Unit	Rp 150.000.000,00	7 Unit	Rp 160.000.000,00	7 Unit	Rp 160.000.000,00
2	23	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	Rp 22.000.000,00	20 Unit	Rp 53.500.000,00	20 Unit	Rp 50.000.000,00	20 Unit	Rp 60.000.000,00
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Rp 25.000.000,00	7 Unit	Rp 50.000.000,00	8 Unit	Rp 50.000.000,00	10 Unit	Rp 60.000.000,00
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp230.000.000,00	2 Unit	Rp 250.000.000,00	2 Unit	Rp 270.000.000,00	2 Unit	Rp 300.000.000,00
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	94500 orang	Rp750.000.000,00	96000 Orang	Rp 800.000.000,00	97500 Orang	Rp 900.000.000,00	99000 Orang	Rp 1.000.000.000,00
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp710.000.000,00		Rp 750.000.000,00					

2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	5 Layanan	Rp220.000.000,00	5 Layanan	Rp 200.000.000,00	5 Layanan	Rp 220.000.000,00	5 Layanan	Rp 240.000.000,00
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	Rp260.000.000,00	2 Perpus	Rp 300.000.000,00	3 Perpustakaan	Rp 300.000.000,00	3 Perpustakaan	Rp 320.000.000,00
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eks	Rp200.000.000,00	2000 Eks	Rp 200.000.000,00	2200 Eks	Rp 220.000.000,00	2500 Eks	Rp 250.000.000,00
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2 Dokumen	Rp 30.000.000,00	2 Dokumen	Rp 50.000.000,00	4 Dokumen	Rp 50.000.000,00	4 Dokumen	Rp 65.000.000,00

2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp 40.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 110.000.000,00		Rp 125.000.000,00
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	Rp 15.000.000,00	2 Lokus	Rp 35.000.000,00	2 Lokus	Rp 80.000.000,00	3 Lokus	Rp 90.000.000,00
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	1 Lokus	Rp 25.000.000,00	1 Lokus	Rp 15.000.000,00	1 Lokus	Rp 30.000.000,00	1 Lokus	Rp 35.000.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			Rp100.000.000,00		Rp 570.000.000,00		Rp 650.000.000,00		Rp 800.000.000,00
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	61	Rp100.000.000,00	66	Rp 370.000.000,00	71	Rp 450.000.000,00	76	Rp 500.000.000,00
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Rp 53.743.500,00		Rp 76.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 120.000.000,00
2	24	2	2.01	0 1	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan			1500 berkas	Rp 30.000.000,00	1550 berkas	Rp 35.000.000,00	1600 berkas	Rp 40.000.000,00

2	24	2	2.01	0 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	200 berkas	Rp 53.743.500,00	50 berkas	Rp 10.000.000,00	75 berkas	Rp 20.000.000,00	100 berkas	Rp 25.000.000,00
3	25	3	2.02	0 3	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	-	-	2 laporan	Rp 36.000.000,00	3 laporan	Rp 45.000.000,00	4 laporan	Rp 55.000.000,00
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			Rp -		Rp 194.000.000,00		Rp 185.000.000,00		Rp 185.000.000,00
2	24	2	2.02	0 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	-	-	500 arsip	Rp 194.000.000,00	500 arsip	Rp 185.000.000,00	500 arsip	Rp 185.000.000,00
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			Rp 46.256.500,00		Rp 100.000.000,00		Rp 165.000.000,00		Rp 195.000.000,00
2	24	2	2.03	0 1	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	120 pengguna	Rp 30.648.200,00	150 pengguna		200 pengguna	Rp 35.000.000,00	250 pengguna	Rp 45.000.000,00
2	24	2	2.03	0 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	Rp 15.608.300,00	12 laporan	Rp 100.000.000,00	12 laporan	Rp 130.000.000,00	12 laporan	Rp 150.000.000,00

2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Rp -		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 300.000.000,00
2	24	3	2.01		Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun						Rp 120.000.000,00		Rp 120.000.000,00		Rp 175.000.000,00
2	24	3	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	-	-	1000 arsip		Rp 50.000.000,00	1000 arsip	Rp 50.000.000,00	2000 arsip	Rp100.000.000
2	24	3	2.01	02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	-	-	500 berkas		Rp 70.000.000,00	500 berkas	Rp 70.000.000,00	500 berkas	Rp 75.000.000,00
2	24	3	2.04		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/Kota						Rp 45.000.000,00		Rp 45.000.000,00		Rp 90.000.000,00

2	24	3	2.04	01	Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	-	-	100 arsip	Rp 30.000.000,00	100 arsip	Rp 30.000.000,00	200 arsip	Rp 60.000.000,00
2	24	3	2.04	02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	-	-	100 arsip	Rp 15.000.000,00	100 arsip	Rp 15.000.000,00	200 arsip	Rp 30.000.000,00
2	24	3	2.05		Pencarian arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang					Rp 35.000.000,00		Rp 35.000.000,00		Rp 35.000.000,00
2	24	3	2.05	01	Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	-	-	1 arsip	Rp 15.000.000,00	1 arsip	Rp 15.000.000,00	1 arsip	Rp 15.000.000,00

2	24	3	2.05	0 2	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	-	-	1 arsip	Rp 10.000.000,00	1 arsip	Rp 10.000.000,00	1 arsip	Rp 10.000.000,00
2	24	3	2.05	0 3	Penetapan dan Pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)	Jumlah daftar pencarian arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	-	-	1 arsip	Rp 10.000.000,00	1 arsip	Rp 10.000.000,00	1 arsip	Rp 10.000.000,00

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Untuk APBN Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	6
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Rp 3.500.000.000,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		Rp 2.550.000.000,00
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Rp 2.550.000.000,00

2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp	2.550.000.000,00
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	Rp	500.000.000,00
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai Kewenangannya	Rp	1.550.000.000,00
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Rp	500.000.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Rp	950.000.000,00

2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	Rp	950.000.000,00
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Rp	800.000.000,00
2	24	2	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Rp	800.000.000,00
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Rp	150.000.000,00
2	24	2	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	150.000.000,00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD:

1. Persentase Pengunjung Perpustakaan
2. Nilai Pengawasan Kearsipan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		Indeks Minat Baca Masyarakat	77	78	77	80	81	81
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	62%	63%	62%	65%	66%	66%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas	70%	71%	70%	73%	74%	74%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Secara Baku	Nilai Pengawasan Kearsipan	68	68,5	68	69,5	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis yang telah disusun dan merupakan agenda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi dalam 4 (empat) tahun ke depan (Tahun 2023 – 2026) akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pegawai, terlokasinya sumber daya yang dibutuhkan, dan dukungan dari *stakeholder* terkait. Dengan memiliki rencana strategis, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi masa depan organisasi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan masa kini. .

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi.